

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Untuk membantu penulis dalam meneliti tulisan ini diperlukan literatur review antara lain,

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan padi di Provinsi Jawa Barat, oleh Muhammad Jundi Fauzan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Ekonomi Syariah. Tulisan penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor sosial ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah industri dan pendapatan asli daerah yang paling berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan di lahan pertanian sawah yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dengan sampel sebanyak 6 daerah yang diambil secara *purposive sampling*. Penelitian ini berkaitan dengan penulisan skripsi yang penulis tulis yakni ketahanan pangan padi di Jawa Barat. Program VECO sendiri untuk daerah Jawa Barat adalah program yang bertema *healthy rice* sehingga perlu adanya literatur review yang bertajuk ketahanan pangan padi di Jawa Barat.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pertumbuhan penduduk adalah variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan padi, jumlah penduduk miskin merupakan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan bagi ketahanan padi, jumlah industri juga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketahanan padi, sedangkan pendapatan asli daerah adalah

variabel yang positif dan tidak signifikan dalam ketanian padi di Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, **NGO Experience in Guarding and Empowering Poor Households in Agricultural Sector: A Reflection**, oleh A. Irawati Hermantyo dari PT Bina Swadaya Konsultan. Jurnal tersebut membahas tentang pemberdayaan keluarga miskin di sektor pertanian yang tidak dapat dilakukan dengan hanya melalui program peningkatan produksi, tetapi juga pada upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Terkait dengan upaya tersebut maka terkait keberadaan *Non Government Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting untuk melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Jurnal tersebut berkaitan dengan skripsi yang penulis tulis dimana VECO sendiri merupakan NGO dari Belgia yang bekerjasama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas padi juga memberdayakan para petani kecil sehingga jurnal ini dirasa perlu untuk sumber literatur penulis.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa peran LSM dan NGO dalam program penganggulangan kemiskinan dalam sektor pertanian sangat strategis, karena mereka mampu mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel baik melalui pemberdayaan masyarakat, dialog kebijakan maupun program-program advokasi. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan terutama melalui departemen pertanian, akan dicapai dengan adanya pola pikir yang sama serta komitmen implementasi yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Terakhir, **Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya**, oleh Sapja Anantanyu dari staf pengajar program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UNS. Jurnal ini membahas tentang Keberadaan lembaga petani yang menjadi penting dalam pembangunan pertanian di suatu negara. Lembaga ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing petani dalam pengembangan sistem agribisnis di Indonesia. Institusi petani yang kuat semakin dibutuhkan di era globalisasi dan perdagangan bebas. Lembaga petani merupakan sarana untuk memperluas kapasitas petani menuju keutuhan diri. Jurnal ini menjelaskan dua hal, yaitu: (1) urgensi keberadaan lembaga petani, dan (2) strategi dalam pengembangan kelembagaan petani. Tulisan ini berkaitan dengan isi dari program VECO sebagai lembaga non pemerintah asal belgia yang juga memanfaatkan sarana prasana dan mendorong petani menuju perdagangan bebas. VECO menjadi lembaga masyarakat yang salah satunya berfokus pada pertanian untuk membantu sertifikasi lahan sehingga dapat meningkatkan daya saing hasil yang didapatkan. Maka dari itu jurnal ini dianggap penulis perlu sebagai literatur review skripsi ini.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani. Penyuluhan pertanian perlu dirancang dengan memberikan muatan (content area) pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus penguatan kapasitas kelembagaan petani. Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak pemangku kepentingan, terutama pemerintah adalah: (a) Meningkatkan kapasitas para penyuluh lapangan, (b) Menggunakan cara-cara atau pendekatan partisipatif yang berorientasi pada

kebutuhan petani dalam melakukan kegiatan penyuluhan, dan (c) Memperkuat kelembagaan penyuluhan.

B. Kerangka Teoritis/Konseptual

Kerangka teori adalah sumber dan landasan untuk membantu menerangkan dan menjelaskan hal yang tengah terjadi atau hal yang akan dibahas oleh penulis. Dalam kerangka teori ini, penulis akan mencoba mengemukakan teori dan konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan laporan praktikum data lapangan yang akan dibahas.

Untuk membahas peran VECO dalam bidang pertanian di daerah Jawa Barat maka diperlukan suatu kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang dapat dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Namun sebelum membangun sebuah kerjasama internasional diperlukan adanya interaksi antara aktor state maupun non-state yang menjadi kajian dari teori Hubungan Internasional. Maka, teori yang dikemukakan adalah hubungan internasional.

Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara sebagai negara didunia.¹

Untuk membangun program di daerah Jawa Barat, maka diperlukan adanya interaksi antara VECO dan pemerintahan Indonesia khususnya pemerintahan Jawa Barat. Program kerja VECO mencakup pemberdayaan terhadap lingkungan

¹ K.J Holsti, *Politik Internasional*, suatu kerangka analisis (Bandung:Binacipta.1992), hlm 27.

yang menjadi salah satu dari tujuan adanya hubungan internasional, sebagaimana telah dikemukakan oleh **Drs. R Soeprpto**:

“Hubungan internasional adalah studi yang orientasinya bersifat efektif (orientasi pasca perilaku) yang hampir sering mengkombinasikan unsur-unsur pendekatan ilmiah dengan tujuan yang jelas nilainya seperti mensubstitusikan perang dengan metode-metode perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian, pengendalian penduduk, pemberdayaan terhadap lingkungan, pemberantasan penyakit, dan kemelaratan manusia.”²

Interaksi ini pun membangun sebuah hubungan antara aktor non-state terhadap aktor state yang dapat dijelaskan melalui definisi Hubungan Internasional menurut **Freddy B.L. Tobing**:

“Hubungan internasional adalah studi antar negara yang cakupannya lebih dari itu, unit-unit realisnya adalah organisasi-organisasi internasional. MNC, bahkan kelompok teroris dikatakan sebagai aktor hubungan internasional. Lebih dari itu, focus bahasanya dapat pula diarahkan pada factor-faktor internal negara.”³

Maka hubungan internasional secara singkat diketahui sebagai interaksi dari aktor-aktor hubungan internasional yang melewati batas wilayah.

Selanjutnya adalah teori kerja sama. **Kerjasama** merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.⁴

Menurut **Abdulsyani**,

“Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk

² <http://www.dosenpendidikan.com/22-pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli-paling-lengkap/>, Diakses pada tanggal 28 November 2017.

³ <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 28 November 2017.

⁴ W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985. h. 492.

mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.”⁵

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.⁶

Sedangkan untuk membahas VECO dan Pemerintahan Jabar maka diperlukan teori Kerjasama Internasional. **Kerjasama internasional** adalah kerja sama yang dilakukan antar negara dalam rangka bertujuan pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri masing-masing.

Untuk mewujudkan program VECO guna membangun pertanian yang lebih maju maka diperlukan adanya kerjasama internasional untuk sama-sama membantu mewujudkan suatu tindakan tertentu. Sebagaimana teori kerjasama internasional yang dijelaskan oleh **Dougherty & Pfaltzgraff (Dougherty & Pfaltzgraff,1997:418):**

“Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat atura-aturan yang disetujui, regulasiregulasi, norma-

⁵ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994 h. 156.

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Mei 2018.

norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty&Pfaltzgraff,1997:418-419)."

Maka secara singkat kerjasama internasional adalah upaya antara dua pihak aktor hubungan internasional untuk membangun kepentingan bersama atau melakukan suatu tindakan tertentu.

VECO sendiri merupakan Organisasi internasional. **Organisasi Internasional** secara sederhana, dapat didefinisikan sebagai: *"Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities."* (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala).

Sedangkan menurut **Starke** Dalam bukunya "An introduction to international law", starke membandingkan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara yang modern. Starke menegaskan

"Pada awalnya seperti fungsi suatu negara modern mempunyai hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan Hukum Tata Negara sehingga dengan demikian

*organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusi internasional”.*⁷

VECO sendiri merupakan Organisasi Internasional Non-Government.

Interaksi dalam dunia internasional tidak hanya didominasi oleh negara, melainkan telah banyak aktor lainnya yang turut berusaha meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya untuk mencapai kepentingannya masing-masing, begitu pula halnya dengan VECO. Baik aktor negara ataupun non negara pada dasarnya seringkali tergabung dalam beberapa organisasi internasional yang digunakan sebagai wadah pencapaian kepentingan. Organisasi internasional yang anggota-anggota di dalamnya merupakan aktor-aktor non negara dikenal sebagai **International Non-Governmental Organization (INGO)**.

David Lewis menjelaskan bahwa,

*“INGO hadir sebagai wadah bagi setiap individu, masyarakat, dan elemen negara untuk turut berinteraksi dalam dunia internasional dan berperan serta dalam proses perkembangannya, termasuk dalam perubahan sosial yang kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh negara (Lewis, 2009: 1).”*⁸

VECO termasuk organisasi internasional non-government.

Salah satu Program Kerja VECO adalah melakukan perdagangan internasional, karena itu diperlukan adanya teori Ekonomi Internasional.

7

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51509/Chapter%20II.pdf;jsessionid=257F557A9D2519D897EA081809F968ED?sequence=3>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2018.

⁸ http://andraina_af-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119778-International%20Organizations-INGO%20sebagai%20Organisasi%20Internasional.html, Diakses pada 17 Januari 2018.

Setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengadakan perdagangan baik interregional maupun internasional, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. VECO sendiri bergerak demi keuntungan para petani kecil salah satunya dengan melakukan perdagangan internasional. VECO mendorong mutu kualitas yang nantinya hasil pertanian dapat dijual ke luar negeri.

Ekonomi internasional dapat didefinisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional perekonomian bangsa pada khususnya dan mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya.

Menurut **Oxlay Summary**, pengertian ekonomi international dilihat dari dua segi, yaitu dari segi ilmiah dan dari segi praktisnya.

a. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi international adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa.

b. Dari segi praktisnya, ekonomi international adalah meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain.

Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Ekonomi internasional sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang juga mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional (ekspor-impor) yang meliputi

perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi (swasta maupun pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara.⁹

Selanjutnya adalah teori Peran. **Peran** adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.¹⁰

Peran menurut **Soekanto (2009:212-213)** adalah

“Proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”

Sedangkan menurut **Merton (dalam Raho 2007 : 67)** mengatakan bahwa

*“Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.”*¹¹

⁹ <http://ardiprawiro.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/38857/Bab+1+Ekoin.pdf>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

¹⁰ <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html#>, Diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

¹¹ Ibid.

VECO sebagai NGO memiliki peran tersendiri untuk meningkatkan kualitas pertanian serta meningkatkan kualitas hidup para petani kecil melalui proses inklusif yang diharapkan dapat menguntungkan baik konsumen maupun produsen.

Dalam Hubungan Internasional akan hubungan kerjasama antar negara yang merupakan pertemuan beragam kepentingan internasional dari beberapa negara yang sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Begitu pula dengan VECO yang bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat.

Menurut **T. May. Rudy** setelah kerjasama terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2005:5).

Definisi kerjasama bilateral menurut **Holsti** dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi oleh semua pihak.*
- 2. Persetujuan atas masalah tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.*
- 3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.*
- 4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.*
- 5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti,1987:652-653).*

Hakekat dari pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan oleh setiap negara memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional.

Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (**Perwita dan Yani, 2005:28**).

Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu:

- Memelihara kepentingan nasional
- Memelihara perdamaian
- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005:29)¹²

VECO sendiri merupakan NGO asal Belgia yang bekerjasama dengan pemerintahan Indonesia.

Untuk membahas kerjasama ini, maka perlu adanya pembahasan mengenai **Pertanian di Jawa Barat**. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibukotanya berada di Bandung. Iklim di Jawa Barat adalah tropis dengan rentang antara 9° C di Puncak Gunung Pangrango dan 34° C di Pantai Utara.

Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang berperan penting dalam produksi pertanian di Indonesia. Hampir 23 persen dari 29,3 ribu kilometer persegi tanah di Jawa Barat dialokasikan untuk produksi beras. Selain itu, hasil pertanian di Jawa Barat menyumbang 15 persen dari seluruh hasil pertanian Indonesia.

¹² http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/505/jbptunikompp-gdl-daditadipe-25234-3-unikom_d-i.pdf, Diakses pada tanggal 27 Februari 2018.

Selain beras, Jawa Barat dikenal juga sebagai penghasil teh terbesar di Indonesia. Lebih dari 70 persen produksi teh nasional diproduksi di Jawa Barat. Hal ini karena Jawa Barat merupakan daerah dataran tinggi dan iklimnya cocok bagi tanaman teh. Areal perkebunan teh tersebar di Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Purwakarta, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka. Selain itu, kebun teh di daerah Jawa Barat, terutama daerah Puncak sering dijadikan tempat rekreasi.

Produksi pertanian di Jawa Barat tidak hanya beras dan teh, tapi juga strawberry. Pasti di antara kita banyak yang suka dengan buah berwarna merah ini. Di Jawa Barat, banyak tersebar kebun strawberry. Sama seperti kebun teh, kebun strawberry juga kerap dijadikan obyek pariwisata. Di daerah Jawa Barat bagian selatan, strawberry menjadi satu produk yang sangat potensial. Perkebunan strawberry banyak ditemui di kecamatan Ciwidey dan Rancabali, Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan sentra penghasil sayuran dan umbi-umbian, seperti bawang putih, bawang merah, bawang daun, kentang, kubis, petsai/sawi, wortel, kacang panjang, cabai besar, tomat, terong, buncis, ketimun, kangkung, bayam, kacang merah, labu siam, lobak, kembang kol, jamur, cabai rawit, dan paprika. Karena itu, kalau kita jalan-jalan sepanjang daerah Puncak, kita bisa melihat banyak pedagang sayuran di sepanjang jalan.

Selain itu, Jawa Barat juga merupakan pusat budidaya tanaman hias. Tanaman hias yang dibudidayakan di Jawa Barat seperti anggrek, anthurium, anyelir, gerbera, gladiol, heliconia, krisan, mawar, sedap malam, dracaena, melati, palem, aglonema, dan lain-lain.

Jawa Barat adalah sentra penghasil pertanian yang berpengaruh besar bagi hasil pertanian di Indonesia. Daerah ini menghasilkan banyak komoditas, seperti beras, teh, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias.¹³

Selain itu, pertanian merupakan salah satu faktor besar dari **Ketahanan pangan di Jawa Barat**. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agen pembangunan bagi pertumbuhan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan di Jawa Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah peningkatan ketersediaan, akses dan keamanan pangan. Kebijakan tersebut dilakukam melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pangan pokok beras, jagung dan kedelai;
2. Menurunnya tingkat kehilangan hasil panen;
3. Menurunnya kerawanan pangan masyarakat;
4. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras;

¹³ <http://annisarindrau11u.student.ipb.ac.id/2011/08/08/pertanian-di-daerah-jawa-barat/>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2017.

5. Meningkatnya keaneragaman konsumsi, kualitas pangan serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras,

6. Meningkatnya pengendalian keamanan pangan.

Sangat mungkin bagi Jawa Barat khususnya atau Indonesia secara umum untuk mencapai kedaulatan pangan pertama karena mayoritas penduduk Indonesia mata pencariannya di sektor pertanian. Kedua iklim di Indonesia hanya mengenal dua musim, yakni hujan dan kering, hal ini memungkinkan lahan sawah untuk bisa ditanami sepanjang tahun. Ketiga enam puluh persen cadangan pangan di Khatulistiwa itu ada di Indonesia. Hal Ini menandakan bahwa Indonesia memang tempat yang strategis di sektor pangan, bisa ditanami sepanjang musim selama masih ada tanah, matahari dan hujan. Kita memiliki tanah yang sangat subur. Kondisi-kondisi demikian merupakan peluang besar bagi negara Indonesia (Murdaningsih, 2016).

Sayangnya, dari tahun ke tahun system pengelolaan pangan di Indonesia masih tidak berubah. Setiap Ramadhan, Idul Fitri, tahun baru dan hari-hari besar lainnya terjadi kelangkaan pangan. Terlihat yang salah dari semua itu ada pada tata kelola yang kurang baik.

Kalau penekanan masalahnya hanya pada produksi, tidak juga. Karena cadangan beras di Bulog tercatat lebih dari dua juta ton, artinya kita punya kemampuan. Ada peningkatan tanam. Ada empat ratus ribu hektar penambahan tanaman baru, dan ini bisa ditingkatkan lagi. Sehingga produksi pangan diharapkan tidak ada masalah. Terutama di daerah Jawa Barat.

Hasil studi menunjukkan walaupun Produktivitas padi sawah di Jawa Barat tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, lahan sawah cenderung menyusut dan masih ada setidaknya 4 (empat) wilayah di Jawa Barat terdeteksi rawan pangan. Kesiapan Jawa Barat dalam mendukung kedaulatan pangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terganggu karena perubahan iklim global dan konversi lahan sawah ke penggunaan lainnya. Pemerintah dan rakyat perlu meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agroindustri dan agrobisnis serta pengolahan hutan-hutan yang lestari. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah menargetkan pengendalian impor pangan dengan cara meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri, pemberantasan mafia impor, dan juga mengembangkan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian.¹⁴

Yang terakhir adalah penjelasan singkat mengenai **Program VECO**. Program VECO berkaitan dengan pembangunan ekonomi desa, faktor pendanaan dan pemberdayaan yang menjadi permasalahan bagi hampir semua perangkat pemerintahan desa. Oleh karena itu posisi desa selalu tertinggal bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kota. Agar desa mampu tumbuh dan berkembang secara ekonomi berdasarkan sumberdaya yang dimilikinya, maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk mewujudkan sebuah kelembagaan desa yang kuat melalui pengembangan ekonomi dan bisnis.

Melalui program VECO yang bertajuk “Pengembangan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa”, diharapkan akan

¹⁴ Suharto Widjojo, “KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM Mendukung KEDAULATAN PANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA” (Badan Informasi Geospasial, 2016), 325-329.

meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam mendapatkan peluang-peluang usaha ekonomi yang berbasis sumber daya lokal.

Kerjasama VECO Indonesia dan programnya disetujui melalui Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya untuk dilanjutkan melalui pemerintah daerah yaitu pemerintahan Provinsi Jawa Barat.¹⁵

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah di kemukakan diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: “Kerjasama VECO dan Pemerintahan Jawa Barat dalam bidang pertanian akan meningkatkan program kerja pertanian Jawa Barat dalam bentuk peningkatan kualitas dan penerapan pertanian berbasis ekonomi.”

¹⁵ RIK VECO Indonesia

D. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas:</p> <p>Kerja Sama VECO dan Pemerintahan Jawa barat dalam bidang pertanian di daerah Jawa Barat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program VECO di Jawa Barat Khususnya Tasik Malaya dalam Meningkatkan Kualitas Padi. 2. Program VECO sebagai pihak ketiga dalam proses penjualan hasil pertanian di Tasik Malaya kepada pihak atau negara lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu kualitas untuk menguntungkan sektor konsumen juga produsen padi. (Rencana Induk Kerja VECO 2014, Dokumen Pemerintahan JABAR) 2. VECO mendorong petani agar menerapkan sistem sosial ekonomi melalui proses penjualan hasil tani ke luar negeri. (Notulen Rapat)
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Akan meningkatkan program kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sertifikasi lahan dari The 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi ini menandakan mutu kualitas yang sudah

<p>pertanian Jawa Barat dalam bentuk peningkatan kualitas dan penerapan pertanian berbasis ekonomi khususnya di wilayah Tasik Malaya.</p>	<p>Institute for Marketology (IMO).</p> <p>2. Kerjasama dari VECO dan pemerintahan Jawa Barat guna membuka akses pasar bagi para petani.</p>	<p>layak untuk dijual ke luar negeri.</p> <p>(www.Indonesia.rikolto.org)</p> <p>2. Kerjasama ini berupa lobi kepada pemerintah agar dipermudah dalam membuka akses pasar bagi petani di Tasik Malaya.</p> <p>(www.indonesia.rokolto.org)</p>
---	--	--

E. Skema Kerangka Konseptual

